

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL  
MODERASI PADA SKPD KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR**

**Hardyansyah**

(ardi.uin@gmail.com)

**Ansyarif Khalid**

**Dosen Akuntansi UNISMUH Makassar**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi pada SKPD kabupaten polewali mandar. Metode Kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan sampel 52 orang yang mempunyai jabatan kasubag keuangan dan bendahara di SKPD Polewali Mandar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun analisis variabel moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian selanjutnya pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan kualitas laporan keuangan.

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to examine the effect of human resources competency and the utilization of information technology to the quality of local government financial reports with the internal control system as a moderating variable in the SKPD of Polewali Mandar. Quantitative method in this study using a sample of 52 people which are the Head of financial officer and the treasurer at SKPD Polewali.*

*The result of the study shows that the human resources competency and the utilization of information technology significantly*

*affect the quality of local government financial reports. The analysis of moderating variables with an approach of absolute deviation value indicates that the internal control system was not able to moderate the influence of human resource competency to the quality of local government financial reports. The results of this study also show that the absolute deviation value indicates that the internal control system is able to moderate the effect of the utilization of information technology to the quality of local government financial reports.*

**Keywords:** *human resources competency, utilization of information technology, internal control system, and the quality of financial reporting.*

## A. LATAR BELAKANG

Fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu kegiatan pemerintahan telah berjalan dengan baik, maka dari itu pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Wati *et al.*, 2014: 1). Sehingga dari publikasi laporan keuangan tersebut dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi dasar pengambilan keputusan.

Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan media yang di gunakan oleh entitas terkhusus pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada pihak yang berkepentingan (publik). Dari perspektif rakyat di daerah, laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan SAP dapat menjelaskan bagaimana pemerintah mengelola keuangan dalam melaksanakan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Standar tersebut dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengelolaan keuangan yang baik harus dikelola oleh sdm yang berkompeten dan menguasai teknologi infomasi. Untuk mencapai hal tersebut maka suatu instansi pemerintah membutuhkan suatu sistem pengendalian inten yang kuat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian internal meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah

(Armando, 2013: 2). BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam meneliti kewajaran laporan keuangan menggunakan pengendalian intern sebagai salah satu kriteria.

BPK berhasil menemukan masih banyaknya data-data yang tidak sesuai serta masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester) I tahun 2015 atas 504 LKPD mengungkapkan sebanyak 5978 permasalahan utama SPI dan yang terjadi pada pemerintah daerah. Permasalahan SPI (Sistem Pengendalian intern) tersebut meliputi 2.222 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.598 kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan belanja, dan 1.158 kelemahan struktur pengendalian intern.

Selain permasalahan kelemahan SPI, BPK juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp. 3,20 Triliun pada pemerintah daerah. Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 3.638 permasalahan berdampak finansial yang meliputi 2.422 (40,41%) kerugian daerah senilai Rp1,42 triliun, 324 (5,41%) potensi kerugian daerah senilai Rp1,41 triliun, dan 892 (14,88%) kekurangan penerimaan senilai Rp373,70 miliar. Selain itu, terdapat 2.355 (39,30%) kelemahan administrasi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah melakukan audit atas LKPD di setiap Kabupaten yang ada di Indonesia selama lima tahun dari tahun 2010-2014. Adanya peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2010-2014 meskipun persentase Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tetap lebih besar dari tahun 2010-2014. Sedangkan Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) persentasenya semakin kecil dari tahun 2010 ke tahun 2014 meskipun ada sedikit peningkatan TW dari 2012 ke tahun 2013.

Hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2010, dinyatakan bahwa terdapat 369 LKPD khususnya Kabupaten yang diperiksa, BPK hanya memberikan opini WTP atas 16 entitas, opini WDP atas 254 entitas, opini TW atas 23 entitas, dan opini TMP atas 103 entitas. Perkembangan opini LKPD dari tahun 2010 ke tahun 2014 menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Pernyataan ini sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2014, dinyatakan bahwa terdapat 379 LKPD khususnya Kabupaten yang diperiksa, BPK memberikan opini WTP atas 169 entitas, opini WDP atas 188 entitas, opini TW atas 4 entitas, dan opini TMP 18 entitas. Meskipun terdapat kenaikan proporsi WTP dan WDP, akan tetapi pemerintah masih harus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangannya dengan mendapatkan opini WTP.

Jadi fenomena mengenai kualitas informasi laporan keuangan sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Hal ini dikarenakan salah

satu target yang ingin diraih Kabupaten Polewali Mandar (Polman) sehubungan dengan agenda reformasi birokrasi sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Penetapan Kabupaten Polman tahun 2013, yaitu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kepada para SKPD agar meningkatkan tertib pengelolaan keuangan dan aset daerah serta mengembangkan sistem pengendalian internal yang optimal ([polmankab.go.id](http://polmankab.go.id)). Akan tetapi kenyataan Kabupaten Polman masih saja mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian. Kondisi tersebut dikarenakan banyaknya temuan didapatkan BPK seperti penatausahaan keuangan, penatausahaan aset belum tertib serta temuan kelemahan sistem pengendalian intern sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan judul penelitian ini yaitu Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating.1.) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Polman?. 2.) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Polman?. 3.) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Polman dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi?. 4.) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Polman dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi?

## **B. TINJAUAN TEORETIS**

### **1. Kompetensi SDM**

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan dasar dan kualitas kerja yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik (Furham, 1990 dalam Aruan, 2003 dalam Fikri *et al.*, 2015: 3). Menurut Aruan (2003) dalam Fikri *et al.* (2015: 8) Kompetensi aparatur pemerintah daerah berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Kompetensi sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas demi keberhasilan organisasinya.

### **2. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya digunakan dalam organisasi sektor swasta tetapi juga dalam organisasi sektor publik, termasuk pemerintah. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan, disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan proses

pembangunan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Pemerintah Pusat dan Daerah yang berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan untuk mengelola keuangan, dan mendistribusikan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi canggih untuk sistem informasi manajemen jaringan bangunan dan proses kerja yang memungkinkan government untuk bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit (Afiah dan Nuryanto, 2013: 159). Menurut Hamzah (2009) dalam Winidyaningrum dan Rahmawati (2010: 7), pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik, dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.

### **3. Sistem Pengendalian Intern**

Arens (2006: 273 dalam Setiyawati 2013: 21) berpendapat bahwa pengendalian intern adalah alat untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian manajemen akan tercapai. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan dari pengendalian intern diterapkan yaitu agar laporan keuangan andal, efisiensi dan efektifitas dan efesiesi terhadap kegiatan operasi pemerintah serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Hal tersebut sama seperti yang dijelaskan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2011) dalam Yendrawati (2013: 169), sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: a) Keandalan pelaporan keuangan. b) Efektifitas dan efisiensi operasi. c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Organisasi akan beroperasi secara efektif dan efisien ketika penerapan pengendalian intern berjalan dengan baik. Penyajian informasi keuangan informasi dapat diyakini kebenarannya dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pengendalian intern dapat dicapai jika organisasi menerapkan komponen-komponen pengendalian intern dari setiap aktivitas operasi (Herman, 2015: 22). Komponen-komponen COSO terdiri dari lima komponen pengendalian intern yang saling berhubungan, yaitu (Janvrine, 2012: 22): (1) Lingkungan Pengendalian (*Environment Control*); (2) Penilaian

Risiko (*RiskValuation*); (3) Aktifitas Pengendalian (*Activity Control*); (4) Informasi dan Komunikasi (*Information and Communications*); (5) Pemantauan (*Monitoring*).

#### 4. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Wati *et.al* (2014), Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan pada organisasi pemerintahan merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain (*stakeholder*) tentang kondisi keuangan pemerintah.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Adapun karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan adalah sebagai berikut:

##### a. Relevan.

Dikatakan relevan ketika informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan/mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang relevan :

##### 1) Memiliki manfaat umpan balik

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu

##### 2) Memiliki manfaat prediktif

Dapat membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu

##### 3) Tepat waktu

Informasi disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan

##### 4) Lengkap

Pengungkapan dalam informasi harus jelas sehingga mampu mencegah terjadinya kekeliruan dalam penggunaan informasi.

##### b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta

secara jujur, serta dapat diverifikasi. Penyajian laporan keuangan secara jujur.

1) Penyajian jujur

informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan.

2) Dapat diverifikasi

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat di uji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3) Netralitas

informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang ada dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya.

d. Dapat dipahami

Informasi yang tersedia dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Berdasarkan Teori dan Hasil Penelitian Terdahulu, maka penulis Mengambil hipotesis sebagai dugaan/ jawaban sementara yaitu :

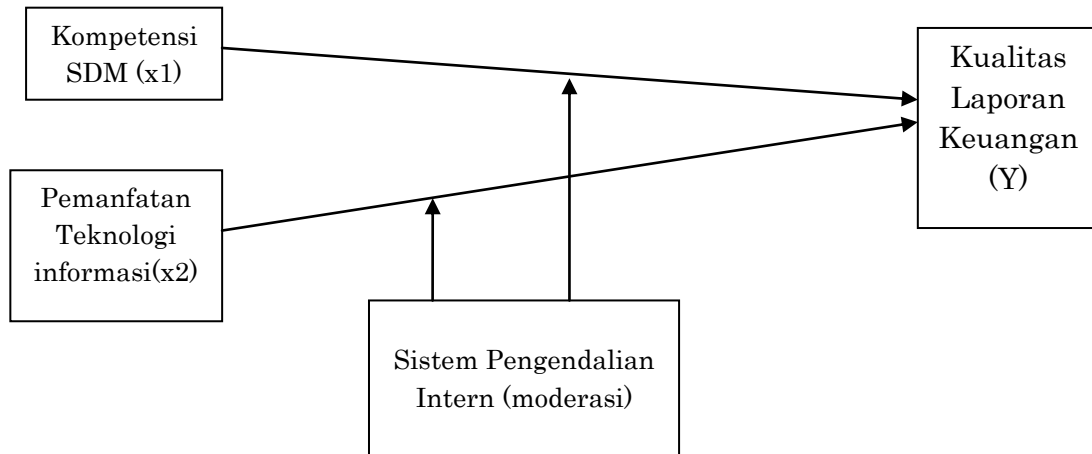
H1 : Diduga Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

H2 :Diduga Teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

H3: Diduga Sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan

H4: Diduga Sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh Pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan.

## 5. Kerangka Pikir



## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif, karena data yang digunakan dalam penelitian yang menguji beberapa hipotesis yang diungkapkan. Penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif, dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa angka-angka atau pernyataan-pernyataan yang dinilai, dan dianalisis dengan analisis statistik. Menurut Sugiyono (2012: 11) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Penelitian ini dilakukan di SKPD Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan korelasional. Menurut Arikunto (2008: 270) pendekatan korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan antar variabel, dan jika ada seberapa beratkah serta berarti atau tidak hubungan itu. Penelitian korelasional bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana variasi pada suatu variabel berkaitan dengan variabel pada satu atau lebih variabel lain berdasarkan koefisien korelasi. Pengukuran terhadap beberapa variabel dan hubungannya dalam penelitian korelasional dapat dilakukan secara serentak dan realistik.

### 3. *Populasi dan Sampel*

Pada bagian ini dijelaskan secara umum tentang hal-hal yang berkaitan dengan populasi dan sampel penelitian, dan secara khusus menjelaskan apa yang menjadi populasi penelitian, jumlah anggota populasi, besar sampel yang diambil dan dasar penentuannya, metode pengambilan sampel dan lokasi sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Menurut Nurhayati (2008) *sampel* adalah sebagian



anggota dari populasi yang dipilih sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya. Dari sampel tersebut akan mempermudah dalam melakukan analisis dan mendapatkan kesimpulan. Populasi yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah 44 SKPD Kabupaten polewali mandar yaitu sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 5 Kantor, 6 Badan, 12 Dinas, 16 kecamatan, Inspektorat, Rumah Sakit Umum, Balai latihan kerja. Dan Masing-masing SKPD diambil dua responden. Jadi Total sampel dalam penelitian ini yaitu 88 sampel. Adapun kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Kasubag keuangan.
- b. Bendahara

#### 4. *Instrumen Penelitian*

Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dalam pengumpulan data. Kuesioner ini dibagikan kepada seluruh responden, dengan mengantarkan langsung kepada responden. Kuesioner ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian data responden dan bagian pernyataan. Di bagian data, peneliti ingin mengetahui data usia, jenis kelamin dan lamanya bekerja responden. Sementara dalam bagian pernyataan, responden diminta untuk memilih item yang sesuai dengan keadaannya dengan skala likert dari 1 sampai 5.

**Tabel 3.1 Skor Jawaban Responden**

N o	Variabel	Indikator	Skala
1	Kompetensi sumber daya manusia	Kemampuan, Keterampilan, Pemahaman dan pengetahuan. (Havesi, 2005 dalam Ihsanti, 2014)	1-5
2	Pemanfaatan teknologi informasi	jumlah Komputer yang memadai, pemanfaatan jaringan internet, proses akuntansi dilakukan secara komputerisasi, penggunaan software sesuai dengan undang-undang (Zuliarti, 2012).	1-5
3	Sistem pengendalian intern	Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktifitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan (PP No.60 Tahun 2008).	1-5
4	Kualitas laporan keuangan	relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010	1-5

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskriptif data atas Variabel penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah Kasubag keuangan dan Bendahara yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan di 27 SKPD Kabupaten Polewali mandar. Peneliti menyebarkan 54 kuesioner, tetapi hanya 52 kuesioner yang bisa dijadikan data penelitian. Tingkat pengembalian (respon rate) sebesar 96,3 % dikarenakan 2 kuesioner tidak kembali sehingga tidak dapat dijadikan sebagai data penelitian.

### 2. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Data

#### a. Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *product moment pearson correlation*. Data dinyatakan valid jika nilai  $r$  hitung yang merupakan nilai item dari *Corrected Item-Total Correlation* > dari  $r$  tabel pada signifikansi 0,05 (5%). Dalam pengujian validitas data dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Pearson Correlation*. Berikut ini disajikan hasil dari uji validitas dari masing-masing variabel.

#### Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi sumber daya manusia (X1)

Instrumen penelitian	$r$ hitung	$r$ tabel	Keterangan
Item_1	0,482	0.268	Valid
Item_2	0,545	0.268	Valid
Item_3	0,464	0.268	Valid
Item_4	0,378	0.268	Valid
Item_5	0,636	0.268	Valid
Item_6	0,486	0.268	Valid
Item_7	0,364	0.268	Valid

(Sumber: Data primer tahun 2016, diolah)

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel Kompetensi sumber daya manusia yang diuji dalam penelitian dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* > dari  $r$  tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

**Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan teknologi informasi (X2)**

Instrumen penelitian	r hitung	r tabel	Keterangan
Item_1	0,640	0.268	Valid
Item_2	0,530	0.268	Valid
Item_3	0,607	0.268	Valid
Item_4	0,390	0.268	Valid
Item_5	0,321	0.268	Valid
Item_6	0,503	0.268	Valid

(Sumber: Data primer tahun 2016, diolah)

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel pemanfaatan teknologi informasi yang diuji dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation*> dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

**Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal (X3)**

Instrumen penelitian	r hitung	r tabel	Keterangan
Item_1	0,600	0.268	Valid
Item_2	0,584	0.268	Valid
Item_3	0,740	0.268	Valid
Item_4	0,773	0.268	Valid
Item_5	0,753	0.268	Valid
Item_6	0,771	0.268	Valid
Item_7	0,461	0.268	Valid
Item_8	0,595	0.268	Valid
Item_9	0,640	0.268	Valid

(Sumber: Data primer tahun 2016, diolah)

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel sistem pengendalian internal yang diuji dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation*> dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

### Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Instrumen penelitian	r hitung	r tabel	Keterangan
Item_1	0,699	0.268	Valid
Item_2	0,733	0.268	Valid
Item_3	0,718	0.268	Valid
Item_4	0,754	0.268	Valid
Item_5	0,521	0.268	Valid
Item_6	0,635	0.268	Valid
Item_7	0,708	0.268	Valid
Item_8	0,594	0.268	Valid
Item_9	0,627	0.268	Valid

(Sumber: Data primer tahun 2016, diolah)

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang diuji dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

#### b. Uji Reliabilitas

Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut yaitu konsistensi. Peneliti dapat mengevaluasi instrumen penelitian berdasarkan perspektif dan teknik yang berbeda, tetapi pertanyaan mendasar untuk mengukur reliabilitas data adalah bagaimana konsistensi data yang dikumpulkan. Pengukuran reliabilitas menggunakan indeks numerik yang disebut dengan koefisien. Konsep reliabilitas dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu koefisien stabilitas, koefisien ekuivalensi dan reliabilitas konsistensi internal.

Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel jika dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ), koefisien reliabilitas > 0,60.

### 3. Uji Realibilitas

#### Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas reliabilitas	Ket.
Kompetensi Sumber Data Manusia	0,746	0.60	Reliabel
Pemanfaatan teknologi informasi	0,752	0.60	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0,891	0.60	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,895	0.60	Reliabel

(Sumber: Data primer tahun 2016, diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, pemanfaatan teknologi informasi Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

**4. Uji Asumsi Klasik**

a. Uji Normalitas

Berdasarkan tabel hasil pengujian normalitas dibawah dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik menggunakan nilai *Kolmogorov-smirnov*. Dari tabel 4.17 dapat dilihat signifikansi nilai *Kolmogorov-smirnov* yang diatas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,828, hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

Hasil Uji Normalitas - *One Sample Kolmogorov-Smirnov*

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,81095939
Most Extreme Differences	Absolute	,087
	Positive	,087
	Negative	-,062
Kolmogorov-Smirnov Z		,626
Asymp. Sig. (2-tailed)		,828

(Sumber: Output SPSS 21)

b. Asumsi Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas dibawah, karena nilai VIF untuk Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Multikolonearitas adalah suatu kondisi hubungan linear antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya dalam model regresi. Salah satu cara untuk menguji adanya multikoloniearitas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Jika nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas.

### Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kompetensi sumber daya manusia	,194	5,168
Pemanfaatan teknologi informasi	,174	5,742
Sistem Pengendalian Intern	,243	4,115

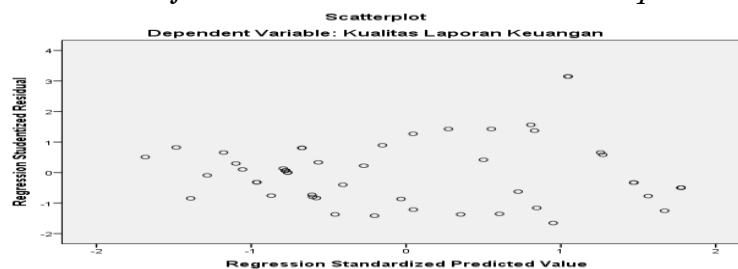
(Sumber: Output SPSS 21)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.19 diatas, karena nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Grafik *Scatterplot* penelitian ini terlihat menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedestisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan masukan variabel independennya (kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal).

#### Hasil Uji Heteroskedastisitas – *Scatterplot*



(Sumber: Output SPSS 21)

Hasil uji heteroskedastisitas dengan *scatterplot* menunjukkan titik-titik yang menyebar secara tidak beraturan secara acak di atas maupun dibawa angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

## 5. Uji Hipotesis

### a. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kandungan

kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan melihat kekuatan hubungan antar kualitas laporan keuangan dengan, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Berikut adalah tabel dari hasil pengujian :

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,908 <sup>a</sup>	,825	,817	1,618

(Sumber: Output SPSS 21)

Hasil analisis regresi berganda dapat diketahui koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,817. Hal ini berarti 81,7% variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, Sedangkan sisanya (100% - 81,7% = 19,3%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

**b. Uji Regresi Secara Simultan (f)**

Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil Uji Statistik F dapat dilihat dari tabel 4.22 berikut ini :

**Hasil Uji F- Uji Simultan ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	603,163	2	301,581	115,197	,000 <sup>b</sup>
	Residual	128,280	49	2,618		
	Total	731,442	51			

(Sumber: Output SPSS 21)

Hasil Uji statistik F pada tabel diatas untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan yang mempunyai F-hitung sebesar 115,197 dengan nilai signifikansi 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi < 5% ( $\alpha = 0,05$ ) dan F-hitung sebesar 115,197 > F-tabel sebesar 3,18 maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi

informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

c. Uji Regresi Secara Parsial (t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu per satu atau secara parsial. Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa :

**Hasil Uji T  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,390	2,570		,152	,880
	Kompetensi SDM	,827	,181	,585	4,558	,000
	Pemanfaatan Teknologi	,521	,192	,348	2,714	,009

(Sumber: Output SPSS 21)

Tabel di atas dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,390 + 0,827 \text{ Kompetensi} + 0,521 \text{ Teknologi} + e$$

- 1) Nilai konstanta sebesar 0.390 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi) adalah nol maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan terjadi sebesar 0.390.
- 2) Koefisien regresi variabel kompetensi sumber daya manusia ( $X_1$ ) sebesar 0,827 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kompetensi sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,827 dengan asumsi  $x_2$  konstant
- 3) Koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi ( $X_2$ ) sebesar 0,521 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,521 dengan asumsi  $x_1$  konstant

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian ( $H_1$ , dan  $H_2$ ) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ( $H_1$ )

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki t hitung sebesar 4,558 > sementara t tabel dengan sig.  $\alpha = 0,05$  dan  $df = n-k$ , yaitu  $54-2=52$



sebesar 1,675 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengelola laporan keuangan pemerintah daerah akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki t hitung sebesar 2,714 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,675. Tingkat signifikansi sebesar 0,009 lebih besar dari 0,05, artinya signifikan. Hal ini berarti pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

d. Pengujian nilai selisih mutlak (*absolute difference value*)

Pengujian nilai selisih mutlak dilakukan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating terhadap kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan . Berikut merupakan tabel dari hasil pengujian nilai selisih mutlak :

**Hasil Uji Selisih Mutlak  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig .
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	38,278	,146		262,569	,000
Zscore(Kompetensi SDM)	1,168	,227	,308	5,145	,000
Zscore(Pemanfaatan TI)	,168	,238	,044	,706	,484
Zscore(SPI)	2,484	,201	,656	12,369	,000
moderat1	,319	,314	,034	1,016	,315
moderat2	1,112	,322	,114	3,453	,001

(Sumber: Output SPSS 21)

1) Tabel menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (moderat1) mempunyai nilai signifikan sebesar 0,315

menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ) dan koefisien regresinya bernilai positif sebesar 0,319, dilihat juga dari t-hitung 1016 > t-tabel sebesar 1,675 yang artinya bahwa H3 ditolak sehingga sistem pengendalian intern tidak mampu menguatkan hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

- 2) Tabel menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (moderat2) mempunyai nilai signifikan sebesar 0,001 menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ) dan koefisien regresinya bernilai positif sebesar 1,112, dilihat juga dari t-hitung 3,453 > t-tabel sebesar 1,675 yang artinya bahwa h4 diterima sehingga sistem pengendalian intern mampu memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Hipotesis pertama diajukan pada penelitian ini adalah bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan yang mengisi posisi atau jabatan disebuah instansi pemerintahan maka akan meningkatkan kualitas pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa responden pada umumnya menyadari bahwa sumber daya manusia menunjukkan bahwa Pegawai yang memiliki kemampuan dibidangnya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Hasil Penelitian ini mendukung d penelitian yang dilakukannya sebelumnya yaitu Novalia (2015), Windiastuti (2013) dan Nurillah (2014). Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan oleh sumber daya manusia. Maka dari itu untuk meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang akuntansi. Hal ini juga mendukung teori stewardship bahwa sumber daya manusia yang tidak termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri tetapi lebih mengutamakan kepentingan organisasi akan senantiasa memaksimalkan kompetensi dalam hal menyelesaikan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan oganisasinya.

### **Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis ini diterima disebabkan oleh pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten polewali mandar. Hal ini juga berarti bahwa terwujudnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tergantung pada kemajuan teknologi yang digunakan. Selain itu, hal ini juga mendukung teori kegunaan informasi bahwa demi mencapai kandungan kualitas primer dari laporan keuangan pemerintah maka diperlukan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membuat pekerjaan pegawai lebih akurat dan cepat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu Nurillah (2014) dan maulidia *et.al* (2015). Penelitian mereka menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi telah sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan terutama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, hal ini juga menunjukkan bahwa SKPD kabupaten polman telah didukung teknologi baik *software* dan *hardware* dalam hal menjalankan kegiatan organisasinya.

### **Pengaruh sistem pengendalian intern dalam memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Hasil analisis regresi moderasi dengan menggunakan pendekatan selisih mutlak menunjukkan bahwa pengendalian intern tidak dapat memoderasi kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimana nilai signifikannya sebesar 0,315 dimana lebih besar dari 0,05 dan koefisien regresi (B) bernilai positif yaitu 0,319. Hal ini berarti hipotesis ke tiga yang mengatakan bahwa sistem pengendalian intern dapat memoderasi kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak terbukti.

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 menjelaskan bahwa pemerintah harus melakukan penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen sehingga ditempatkan sesuai dengan bidangnya masing dan melakukan pelatihan serta pembinaan demi

meningkatkan kompetensi pegawai dibidangnya. Sumber daya manusia akan melakukan pekerjaan dengan baik jika ditempatkan pada dibidangnya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Pelatihan juga harus dilakukan oleh pemerintah setempat demi meningkatkan kompetensi. Maka dari itu pemerintah membutuhkan sistem pengendalian yang memadai.

Sistem pengendalian intern yang memadai dapat berperan dalam memaksimalkan kompetensi sumber daya manusia. Hal tersebut berupa pelatihan juga diperlukan untuk mempertahankan kompetensi sumber daya manusia dari ilmu yang kian hari semakin berkembang. Sehingga dari sistem pengendalian intern mampu memaksimalkan kompetensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini tidak mendukung teori *stewardship*. Teori tersebut didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya (Zamrana dalam Riyadi dan agung ,2014: 468). Dari teori dapat menjelaskan pemerintah sebagai *steward* akan meningkatkan kompetensi pegawai sebagai upaya yang terbaik pada masyarakatnya sebagai *principal*. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai dibutuhkan sistem pengendalian intern yang memadai. Maka dari itu dibutuhkan sistem pengendalian intern dalam mengelola sumber daya manusia agar ditempatkan sesuai dengan bidangnya.

Dalam penelitian ini responden sepakat bahwa pemerintah masih kurang dalam penempatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang akuntansi. Padahal pemerintah kabupaten polewali mandar telah mempunyai cukup banyak pegawai dibidang akuntansi akan tetapi kurangnya evaluasi terhadap posisi pegawai maka dari itu rata-rata pegawai di SKPD kabupaten polewali polman tidak ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Meskipun faktanya pemerintah polewali kabupaten telah banyak melakukan pelatihan akan tetapi pegawai tersebut sukar memahami materi pelatihan tersebut dikarenakan tidak adanya dasar ilmu dari pendidikan akuntansi dan kurangnya pembinaan kepada pegawai. Sama halnya hasil penelitian yang dilakukan fikri *et al.* (2015) menunjukkan sistem pengendalian intern tidak dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Ini dikarenakan banyaknya pengelola keuangan yang bukan berlatang pendidikan akuntansi serta kurangnya pembinaan pemerintahan setempat.

Secara logika rasional juga dapat menjelaskan sebab sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi hubungan antara

kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dikarenakan sistem pengendalian intern merupakan suatu proses tindakan yang terintegrasi pada kegiatan yang di jalankan oleh pimpinan untuk mber daya manusia suatu organisasi demi mencapai tujuan organisasi. Ketika pimpinan suatu organisasi bukan seseorang yang berkompeten dalam menjalankan sistem pengendalian intern maka sistem pengendalian intern tidak akan jalan mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya manusia sebagaimana mestinya. Sehingga sistem pengendalian tidak mampu mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya manusia.

#### **Pengaruh sistem pengendalian intern dalam memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Hasil analisis regresi moderasi dengan menggunakan pendekatan selisih mutlak menunjukkan bahwa pengendalian intern dapat memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimana nilai signifikannya sebesar 0,001 dimana lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi (B) bernilai positif yaitu 1,112. Hal ini berarti hipotesis ke tiga yang mengatakan bahwa sistem pengendalian intern dapat memoderasi pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terbukti.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten polewali mandar telah mempunyai Sistem pengendalian intern yang memadai dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Sistem pengendalian intern tersebut berupa pengendalian atas aplikasi. Pengendalian aplikasi dilakukan untuk memastikan bahwa tdk adanya kerusakan pada perangkat lunak dan keras dengan melakukan *back up* data ke komputer lain. Pengendalian aplikasi juga dilakukan untuk pengembangan dan perubahan perangkat lunak serta pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Utomo (2006 : 66) bahwa didalam suatu lingkungan yang dikomputerisasi harus diterapkan pengendalian-pengendalian untuk mengurangi risiko pengulangan kesalahan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan benar-benar akurat.

Terkait hasil penelitian ini, responden sepakat bahwa jika sistem pengendalian intern mampu mengoptimalan pemanfaatan teknologi dengan baik maka akan berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi *et al.* (2015) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah secara simultan dan parsial.

Penelitian ini mendukung teori *stewardship*. Teori tersebut didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya (Zamrana dalam Riyadi dan Agung, 2014: 468). Dari teori tersebut dapat menjelaskan pemerintah sebagai *steward* akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya yang terbaik pada masyarakatnya sebagai *principal*. Pengendalian intern bertujuan agar organisasi tetap memanfaatkan teknologi dalam memberikan informasi terkait kegiatan organisasi dikarenakan pengendalian intern sudah terintegrasi dengan teknologi.

Sistem pengendalian intern secara islam juga menuntut keandalan pelaporan keuangan yang berguna untuk memberikan informasi keuangan dan kinerja organisasi bagi pihak internal maupun eksternal. Informasi keuangan yang berkualitas dihasilkan oleh pemanfaatan teknologi informasi yang pula. Pengendalian aplikasi dilakukan untuk memastikan bahwa tdk adanya kerusakan pada perangkat lunak dan keras dengan melakukan *back up* data ke komputer lain.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ini berarti, jika kompetensi sumber daya manusia meningkat maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ini berarti, jika pemanfaatan teknologi meningkat maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.
3. Uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi dan memperkuat hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan pemerintah masih kurang dalam penempatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang akuntansi. Padahal pemerintah kabupaten polewali mandar telah mempunyai cukup banyak pegawai dibidang akuntansi akan tetapi kurangnya evaluasi terhadap posisi pegawai maka dari itu rata-rata pegawai di SKPD kabupaten polewali polman tidak ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Akan tetapi faktanya pemerintah polewali kabupaten telah banyak melakukan pelatihan akan tetapi pegawai tersebut sukar memahami materi pelatihan tersebut dikarenakan tidak

adanya dasar ilmu dari pendidikan akuntansi dan kurangnya pembinaan kepada pegawai.

4. Uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern mampu memoderasi dan memperkuat hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten polewali mandar telah mempunyai Sistem pengendalian intern yang memadai dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Sistem pengendalian intern tersebut berupa pengendalian atas aplikasi. Pengendalian aplikasi dilakukan untuk memastikan bahwa tidak adanya kerusakan pada perangkat lunak dan keras dengan melakukan *back up* data ke komputer lain. Pengendalian aplikasi juga dilakukan untuk pengembangan dan perubahan perangkat lunak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Armando, Gerry. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah*. Jurnal akuntansi no.1 vol.1, 2013.
- Fikri, M. Ali., Biana A.D dan RR. Sri P.M. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Skpd-Skpd Di Pemprov. NTB)*. Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara Medan. 2015.
- Herman. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening*. Tesis. Makassar: Fakultas Ekonomi dan bisnis universitas hasanuddin, 2015.
- Ihsanti, Emilda. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD kab. Lima Puluh Kota. Artikel. Universitas Negeri Padang)*, 2014.
- Maulidia, Imraah., Rizal Effendi., dan Cherrya Dhia. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dispenda Kota Palembang*. Jurnal STMIK GI MDP, 2015.

- Nurhayati. *Studi perbandingan metode sampling antara Simple random dengan stratified random*. Jurnal Basis Data, ICT Research Center UNAS Vol.3 No.1: Mei, 2008.
- Nurillah, As Syifa. *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (sakd), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada skpd kota depok)*. Skripsi. Universitas Diponegoro, 2014.
- Nuryanto, Muh dan Nunuy N. Afiah. *The Impact of Apparatus Competence, Information Technology Utilization and Internal Control on Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province - Indonesia)* Woird Review of Business Research Vol.3 No.4 Issue Pp. 157-171.
- Riyadi, Slamet dan Agung Yulianto. *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli Financing To Deposito Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Accounting Ananlysis Journal volume 3 nomor 4, 2014.
- Setiyawati, Hari. *The Effect Of Internal Accountants' Competence, Managers' Comitment To Organization And The Implementation Of The Internal Control System On The Quality Of Financial Reporting*. International Journal Of Business And Management Invention [www.ijbmi.org](http://www.ijbmi.org) volume 2 issue 11, 2013.
- Wati, K. Desianan., N. Trisna Herawati dan Ni. K. Sinarwati *Pengaruh Kompetensi Sdm, Penerapan Sap, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. E-journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurnal Akuntansi program S1 Volume 2 No:1, 2014.
- Winidyaningrum dan Rahmawati. *Pengaruh SDM dan Pemanfaatan TI Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemda Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi*. Jurnal SNA. STIE ST. Pignatelli: Surakarta, 2010.
- Yendrawati, reni. *Pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas Sumber daya manusia terhadap kualitas informasi Laporan keuangan dengan faktor eksternal Sebagai variabel moderating*. JAAI VOLUME 17 NO. 2,: 166–175, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Windiastuty, Ruri. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Kasus Pada*



*Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Bandung ).  
Skripsi. Universitas Widyatama, 2013.*

Zuliarti. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi pada Pemerintah Kabupaten Kudus. Skripsi. Kudus: Fakultas Ekonomi Universitas Mulia Kudus, 2014.*